

Corporate Social Reporting: Implikasi Kebutuhan Akuntabilitas dan Kontrak Sosial

Denies Priantinah*

Abstrak

Perusahaan selaku pelaku bisnis adalah institusi yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi ini membuat perusahaan tidak bisa melepaskan tanggung jawab sosial. Keseriusan perusahaan untuk memperhatikan aspek sosial merupakan hal penting karena lingkungan memberikan andil dan kontribusi, disamping masyarakat merupakan konsumen potensial bagi perusahaan.

Pengabaian tanggung jawab sosial oleh perusahaan bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Akuntansi selaku bagian integral dari dunia bisnis bisa menjadi alat mencegah terjadinya penggunaan sumber daya yang tidak tepat ini. Hal ini bisa dilakukan karena laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai *stewardship* atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Akuntansi sebagai proses penghasil informasi keuangan mampu mengukur upaya perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosialnya, melalui akuntansi sosial dan CSR (*Corporate Social Reporting*).

Ketiadaan format pelaporan akuntansi sosial dan pendekatan pengukuran dampak sosial perusahaan yang baku dan seragam merupakan masalah mendasar yang perlu dicermati, mengingat akuntansi sosial mendapat kedudukan yang penting di masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang mempublikasikan CSR mendapat apresiasi yang bagus, baik di masyarakat, maupun di pasar modal. Artikel ini membahas mengenai pengertian akuntansi sosial, pengertian serta pergeseran tujuan perusahaan. Artikel ini juga menyajikan beberapa pendekatan pengukuran dampak sosial serta bentuk pelaporannya. Pada gilirannya diharapkan akuntan dan pengguna informasi akuntansi dapat berperan dalam membantu penanganan masalah lingkungan.

Keywords: Akuntansi Sosial, *Corporate Social Reporting*, *Externalities*, *Social cost*, *Social Benefit*.

A. Pendahuluan

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan tersebut perusahaan akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sosial. Keseriusan perusahaan untuk memperhatikan aspek sosial sangat penting karena lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan. Problem yang timbul dalam komunitas industri adalah, secara berkesinambungan berkembang sebagai institusi bisnis namun tetap memperhatikan dampak sosial yang terkait dengan aspirasi dan tujuan sosial. Problem tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa dampak sosial perusahaan seringkali tidak secara langsung dikaitkan dengan proses formal perusahaan. Aspek ini

seringkali tidak dimasukkan dalam proses operasional perusahaan dipandang dari perspektif manajemen.

Kita tentunya sependapat bahwa lingkungan sosial merupakan hal yang penting dalam proses bisnis perusahaan. Isu kerusakan lingkungan yang menjadi dampak negatif institusi bisnis merupakan hal yang sangat krusial. Tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih disoroti oleh masyarakat apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik.

Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya akan menyebabkan simpati masyarakat berkurang. Apabila hal ini terjadi terus menerus tanpa ada tindakan proaktif dalam merespon harapan masyarakat, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terancam. Hal ini terjadi karena masyarakat adalah konsumen potensial serta *stakeholder* bagi perusahaan. Respon perusahaan terhadap tanggung jawab sosial akan menimbulkan kebutuhan untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan. Kebutuhan akan hal ini mendorong berkembangnya akuntansi sosial.

Pandangan tradisional melihat bahwa kinerja perusahaan diukur melalui pencapaian laba maksimal. Sudut pandang ini menyatakan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan *stockholder*. Pandangan modern melihat bahwa tujuan perusahaan tidak hanya untuk memperoleh laba maksimal namun juga untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan. Tujuan perusahaan dari sudut pandang modern ini antara lain meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat, kelangsungan usaha dan tujuan lainnya (Glueck dan Jauch, 1984).

Analisis komprehensif tentang dampak sosial institusi bisnis banyak dilakukan saat ini. Analisis berupa pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) banyak dilakukan oleh perusahaan di beberapa negara maju. Perusahaan tersebut banyak yang menyajikan data kinerja sosial perusahaan. Penyajian tersebut dilakukan atas inisiatif internal perusahaan ataupun sebagai respon terhadap permintaan pihak eksternal. Laporan tahunan Beresford's mengungkapkan bahwa 298 dari 500 perusahaan fortune menyajikan data kinerja sosial dalam laporan tahunan mereka pada tahun 1973. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan dan perhatian mereka terhadap bentuk audit sosial (Ackerman, 1973, Diekers and Bauwer, 1973). *SEC (Stock Exchange*

Commission) juga meminta perusahaan untuk menyajikan kebijakan lingkungan, rencana dan kinerja perusahaan ditinjau dari aspek sosial. Himbauan ini ditujukan bagi perusahaan yang proses operasionalnya menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan. Kinerja perusahaan ditinjau dari sudut pandang sosial semakin banyak disorot di AS. Kelompok studi pada *Objective of Financial Statemens* (1973:pp.57-63) mengusulkan tujuan laporan keuangan diantaranya menyajikan laporan mengenai aktivitas sosial perusahaan.

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa investor memasukkan variabel sosial yang terkait dengan masalah kelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Investor memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup atau perusahaan yang memiliki standar tinggi dalam masalah sosial dan lingkungan hidup.

The Millennium Poll on Corporate Social Responsibility yang disponsori oleh PricewaterhouseCoopers meneliti 25.000 responden dari 23 negara di enam benua. Hasil penelitian tersebut menyebutkan, kesan sebagian besar responden terhadap perusahaan lebih ditentukan oleh faktor *corporate citizenship* dibanding reputasi merek atau bahkan kinerja finansial. Dua pertiga responden mengharapkan institusi bisnis menekankan pada kinerja finansial tetapi juga harus memperhatikan tercapainya tujuan sosial. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa keputusan pembelian produk atau jasa ditentukan oleh persepsi mereka mengenai kinerja sosial perusahaan (Johan Pinarwan, 2000).

Penelitian lain menggunakan suatu variabel yang dinamakan Dow Jones Sustainability Group Index (DJSI). DJSI merupakan turunan dari Dow Jones Group Index (DJGI). Metodologi untuk menghitung DJSI sama dengan metodologi penghitungan DJGI. DJSI terdiri dari lebih dari 200 perusahaan yang mewakili 10% dari seluruh perusahaan yang dianggap terdepan dalam hal sustainability dan tersebar di 73 industri dan 33 negara. Menurut penelitian, rasio risiko/return indeks DJSI adalah 10,8% (*standard deviation*)/17% (*annualised return*) dibandingkan dengan rasio yang sama untuk indeks DJGI yang sebesar 9,8%/13%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa secara relatif kinerja perusahaan yang terdepan dalam hal sustainability lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan pada umumnya walaupun risiko yang terkait juga lebih tinggi. Dengan kata lain, perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang sebesar-

besarnya bagi pemiliknya adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup (Johan Pinarwan, 2000).

Di AS institusi EPA (*Enviromental Protection Agency*) menerapkan kebijakan yang menekan perusahaan untuk membiayai dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Kebijakan tersebut didukung oleh otoritas pasar modal yang juga menganjurkan perusahaan untuk menyajikan (*discosure*) mengenai informasi polusi oleh perusahaan. Namun hal ini tidak diikuti dengan kenyataan bahwa setiap perusahaan secara menyajikan informasi tersebut secara mencukupi (*sufficient information*) dalam laporan keuangannya (New York Times, 1979)

Perkembangan ilmu akuntansi yang pesat seiring dengan kemajuan bisnis global membuat akuntansi sosial banyak berkembang dan mendapat perhatian. Namun kemajuan akuntansi sosial ini dinilai lambat dan sporadis. Tidak ada perusahaan yang mengimplementasikan suatu pendekatan sistem informasi yang sistematis untuk mensosialisasikan aspek sosial perusahaan.

Makalah ini ditulis untuk memberikan sumbangan terhadap kemungkinan semakin berkembangnya akuntansi sosial di Indonesia. Makalah ini memfokuskan pengkajian akuntansi sosial dalam tataran teoritis, konsep, aspek dan pelaporannya

B. Pembahasan

Pergeseran Tujuan dan Tanggung Jawab Perusahaan

Pandangan modern menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Kesadaran bertanggung jawab ini berkembang karena pergeseran tujuan perusahaan selain memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham juga mampu memaksimalkan fungsi sosialnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Belkouli dengan mengemukakan tiga model perkembangan pertanggungjawaban perusahaan :

1. Model klasik, menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Model manajemen, perusahaan tidak hanya menguntungkan pemilik modal saja tetapi juga pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan hidup perusahaan.

3. Model lingkungan sosial, menekankan bahwa perusahaan mempunyai kepentingan dan bersumber dari lingkungan sosial. Konsekuensinya perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya punya tanggung jawab terhadap tercapainya laba maksimal, tetapi juga harus mempunyai tanggung jawab sosial seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan lingkungan tanpa menghapus misi ekonominya.

Pergeseran model merupakan respon dari perkembangan harapan masyarakat akan institusi bisnis. Tanggung jawab perusahaan timbul sebagai respon atau tindakan proaktif perusahaan akan harapan masyarakat tersebut. Perkembangan harapan masyarakat tersebut terbagi atas 3 tahap (Mondi and Premeaux):

- Tahap pertama: harapan masyarakat hanya terbatas pada fungsi ekonomi tradisional.
- Tahap kedua: masyarakat mengakui tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi dengan kesadaran atas perubahan tujuan, nilai dan permintaan sosial.
- Tahap ketiga: masyarakat mengharapkan perusahaan membantu pencapaian tujuan masyarakat.

Perkembangan ini mempunyai indikasi bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya yang mempengaruhi masyarakat, lingkungan dan komunitasnya.

Tanggung jawab sosial itu sendiri terdiri atas 3 tahap (Gray and Smeltzer, 1990), yaitu:

- Tahap pertama: *profit maximizing management*, perusahaan bertujuan mencapai laba maksimal. Manager berpandangan bahwa dengan memaksimalkan laba maka tujuan perusahaan akan tercapai.
- Tahap kedua: *Trusteeship management*, manager bertanggung jawab kepada pemilik, kastamer, karyawan, pemasok, *stockholder* dan pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi secara langsung kepada perusahaan.
- Tahap ketiga: *quality of life management*, manajemen berpandangan bahwa problem sosial yang timbul akibat kesuksesan perusahaan di bidang ekonomi, secara langsung ataupun tidak langsung, harus pula menjadi tanggung jawab perusahaan. Tahap ini mulai direspon perusahaan dengan upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup sosial dengan mengemban tanggung jawab sosialnya dengan lebih baik.

Aspek Sosial Perusahaan dan Keterkaitannya dengan Akuntansi

Akuntansi sosial merupakan respon perusahaan selaku institusi bisnis terhadap harapan masyarakat. Perlakuan terhadap setiap transaksi dalam dunia akuntansi, termasuk isu mengenai lingkungan merupakan poin yang menarik dari titik pandang teori akuntansi. Hendriksen dan Breda (1992) menyatakan dalam tulisannya mengenai teori akuntansi mengemukakan: pertama, bahwa isu-isu teori tidak semata-mata persoalan teori. Isu mengenai lingkungan yang muncul akan mempunyai implikasi praktek, baik dari sisi manajemen maupun sisi auditor dan pihak-pihak lain. Kedua, bahwa teori akuntansi seringkali adalah persoalan pertimbangan profesional individu yang terlibat dalam suatu persoalan secara khusus. Hal ini menyebabkan *Financial Accounting Standard Board* (*FASB*) sebagai lembaga pembuat standar akuntansi keuangan di Amerika mengemukakan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam dua tingkat. Pada tingkat pertama pilihan dilakukan oleh lembaga formal yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa dunia bisnis menerapkannya. Pada tingkat kedua pilihan dapat dilakukan perusahaan secara individual.

Perspektif teori akuntansi keuangan yang terkait dengan masalah lingkungan dilatarbelakangi oleh hal-hal tentang masalah lingkungan, akuntan dan akuntansi sosial. Secara dimensional lingkungan dapat berarti lingkungan sekarang dan lingkungan masa depan. Secara struktural lingkungan mencakup lingkungan eksternal dan lingkungan internal dan secara fisik dapat berarti lingkungan fisik dan lingkungan non fisik.

Sudut pandang manajemen perusahaan menyatakan bahwa lingkungan merupakan sasaran dalam tujuan strategik perusahaan. Sudut pandang akuntansi, khususnya akuntansi konvensional, melihat lingkungan ditinjau dari sisi entitas ekonomi, sehingga berkonotasi bukan lingkungan dalam konteks ekologi. Lingkungan dalam hal ini mengacu kepada pengertian peristiwa-peristiwa ekonomi yang dideskripsikan dalam ukuran keuangan (Abdul Halim, 1999).

Walaupun tidak secara langsung akuntan dan akuntansi lingkungan dapat berperan dalam membantu masalah penanganan lingkungan. Rob Gray (1993) mengemukakan peranan akuntan dalam membantu manajemen pada masalah lingkungan melalui lima fase, yaitu:

1. Sistem akuntansi dimodifikasi agar mampu mengidentifikasi masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini dikaitkan dengan biaya atau penghasilan, seperti biaya kemasan (*packaging*), biaya hukum, biaya energi dan lain-lain.
2. Sistem akuntansi dikembangkan untuk mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin timbul, contohnya penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan.
3. Sistem akuntansi dikembangkan untuk memperhatikan isu-isu lingkungan yang berubah dengan cukup cepat.
4. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal diperbaharui dengan memasukkan unsur-unsur sosial, seperti berubahnya ukuran kinerja perusahaan di masyarakat.
5. Pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem akuntansi dikembangkan dengan memasukkan unsur sosial, seperti adanya *eco balance sheet*.

Penjelasan diatas memaparkan bahwa akuntansi tidak secara langsung berkaitan dengan isu lingkungan. Hubungan antara akuntansi dan lingkungan timbul melalui isu bisnis, dimana salah satu isu bisnis yang muncul adalah isu lingkungan. Isu tersebut terkait dengan masalah manajemen keuangan perusahaan.

Akuntansi dari sudut pandang tradisional menjadi alat manajemen, terutama manajemen keuangan. Akuntansi dirancang untuk mendukung keperluan manajemen pada berbagai area dalam pengambilan keputusan. Munculnya isu lingkungan dalam area pengambilan keputusan bisa menimbulkan konflik kepentingan antara akuntansi dan manajemen keuangan dengan masalah lingkungan. Masuknya isu lingkungan ke dalam manajemen pada gilirannya membuat akuntansi perlu meninjau kembali hal-hal yang selama ini menjadi perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut seringkali meliputi: kriteria penilaian investasi, kriteria penilaian kinerja, kendala-kendala penganggaran, kinerja harga saham, pelaporan pendapatan per lembar saham, perancangan biaya dan lain-lain.

C. Pengertian Akuntansi Sosial Perusahaan

Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif (APB statemen no. 4). Data kuantitatif yang disediakan oleh akuntansi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut SAK adalah menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai *stewardship* atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pandangan akuntansi konvensional menyatakan, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan yang merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi (Belkoui,1981). Pertukaran antara perusahaan dan lingkungan sosialnya cenderung diabaikan, sehingga akuntansi konvensional tidak mampu mendeskripsikan prestasi sosial perusahaan. Hal ini merupakan keterbatasan akuntansi konvensional. Konsep akuntansi perlu diperluas sehingga menggambarkan pencapaian kinerja sosial perusahaan. Seidler berpendapat keterbatasan inilah yang menjadi salah satu pemicu berkembangnya ilmu akuntansi yang disebut dengan akuntansi sosial ekonomi.

Akuntansi sosial merupakan pengidentifikasian, pengukuran dan analisis konsekuensi ekonomi dan sosial antara perusahaan dengan lingkungannya (Freedman, 1989). Menurut Mathew dan Perefia (1996), akuntansi sosial digunakan untuk menggambarkan bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan *externalities* ke dalam rekening perusahaan seperti informasi tentang tenaga kerja, produk dan pencegahan atau pengurangan polusi. Masalah utama akuntansi sosial diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga bisa dikomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan.

Akuntansi sosial merupakan hal yang penting untuk eksistensi institusi bisnis dewasa ini. Ramanathan menyebutkan bahwa akuntansi sosial secara teoritis akan berkembang dengan dua premis dasar yang melandasinya, yaitu:

1. Sebagian besar masalah sosial yang timbul membutuhkan solusi berupa tindakan aktif dan sukarela dari organisasi bisnis.
2. Hakekat ukuran laba perusahaan tidak mampu mendeskripsikan kebijakan perusahaan. Skema pengukuran kinerja perusahaan dengan sudut pandang yang baru sangat dibutuhkan, termasuk dari sudut pandang sosial.

Beberapa institusi sosial, tidak terkecuali institusi bisnis, beroperasi dengan komunitasnya. Hubungan ini mencerminkan, mengimplikasikan serta berdasarkan

kontrak sosial. Kelangsungan hidup dan dan pertumbuhan kontrak sosial tersebut didasarkan pada:

1. Kontribusi dari beberapa tujuan sosial yang diharapkan pada komunitas.
2. Distribusi dari ekonomi, sosial, atau manfaat politis terhadap kelompok.

Adanya akuntansi sosial diharapkan dapat membantu mengevaluasi sejauh mana perusahaan memenuhi kontrak sosialnya. Ramanathan menyatakan pula bahwa definisi dari akuntansi sosial adalah sebagai berikut:

“Proses penyeleksian tingkat variabel kinerja sosial perusahaan, pengukuran dan prosedur pengukuran, serta pengembangan informasi yang berguna secara sistematis untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan kelompok sosial baik di dalam maupun luar perusahaan.”

D. Sifat Akuntansi Sosial

Akuntansi keuangan konvensional menitikberatkan dampak yang ditimbulkan akibat transaksi antara dua atau lebih kesatuan ekonomi ditinjau dari unit moneter. Pandangan konvensional ini menyebabkan pertukaran antara suatu perusahaan dan lingkungan sosialnya praktis sering diabaikan. Akuntansi sosial yang bertujuan untuk mengoreksi pengabaian ini didasarkan pada tesis bahwa struktur masyarakat tidak hanya menentukan aktivitas ekonomi. Struktur ini juga mempengaruhi hubungan sosialnya dan kesejahterannya. Pengukuran yang terbatas pada konsekuensi ekonomi saja tidaklah memadai sebagai suatu penaksir hubungan sebab akibat sistem semesta, pengukuran ini mengabaikan pengaruh sosial.

Akuntansi sosial dipandang sebagai proses pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antara suatu perusahaan dan lingkungan sosialnya. Akuntansi sosial merupakan suatu ekspresi tanggung jawab sosial perusahaan. Pertukaran antara perusahaan dan masyarakat, pada dasarnya terdiri dari penggunaan sumber-sumber sosial. Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan berkurangnya sumber daya sosial, maka hasilnya adalah biaya sosial (*social cost*), apabila aktivitas perusahaan menyebabkan bertambahnya sumber sosial maka hasilnya adalah berupa manfaat sosial (*social benefit*).

Tujuan akuntansi sosial adalah mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat, yang ditimbulkan oleh aktivitas yang terkait proses produksi perusahaan. Akuntansi sosial bertujuan mengeksternalisasi biaya sosial dan manfaat sosial sehingga menentukan hasil sosioekonomi perusahaan yang lebih relevan dan sempurna. Pemakaian teknik dari disiplin lain yang relevan diperlukan dalam akuntansi sosial. Linowes mendefinisikan akuntansi sosial sebagai penerapan akuntansi di bidang sosial yang meliputi ilmu pengetahuan masyarakat, ilmu pengetahuan politik dan ilmu pengetahuan masyarakat. Dimensi akuntansi sosial yang diusulkan diantaranya adalah: akuntansi pendapatan nasional, evaluasi program sosial, peranan akuntansi dalam pengembangan ekonomi, pengembangan indikator sosial dan pemeriksaan (audit) sosial. Penggunaan dimensi tadi terkait dengan pengakuan dan pengukuran biaya sosial dan manfaat sosial. Biaya dan manfaat sosial tersebut merupakan dasar bagi akuntansi sosial.

Kendati pelaporan akuntansi sosial masih berada dalam tahap perkembangan yang dini, namun respon dari perusahaan akan memberikan harapan yang besar untuk perkembangan akuntansi sosial. Perusahaan diharapkan semakin tanggap untuk membuat laporan keuangan dengan memasukkan pengungkapan sosial dengan kadar informasi yang berubah-ubah mengenai pengaruh sosial aktivitasnya perusahaan. Beberapa laporan sosial itu meliputi laporan rugi-laba sosial dan sebuah neraca sosial. Laporan perhitungan rugi laba sosial menunjukkan biaya sosial dan manfaat sosial bagi perusahaan, para pemegang saham, staff, klien serta publik. Neraca sosial mengungkapkan aktiva staff, aktiva organisasi, penggunaan barang umum, aktiva keuangan dan aktiva fisik.

Survey mengenai investasi yang dilakukan Longstreth dan Rosenbloom menyimpulkan bahwa lima puluh tujuh persen responden menunjukkan mereka mempertimbangkan faktor sosial disamping faktor ekonomi ketika mempertimbangkan keputusan investasi. Eksperimen lapangan yang dilakukan Belkoulli terhadap laporan keuangan perusahaan mengenai biaya pencemaran menunjukkan bahwa biaya pencemaran yang diungkapkan mempunyai pengaruh terhadap keputusan investasi.

Beberapa studi empiris berbasis pasar telah dilakukan untuk menaksir relevansi pengungkapan tanggung jawab sosial dari perusahaan ternyata mempengaruhi perilaku investor dan nilai saham. Belkoulli melaporkan bahwa perilaku harga saham perusahaan yang membuat pengungkapan sosial berbeda dengan perilaku harga saham perusahaan yang tidak membuat pengungkapan sosial. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa

harga saham perusahaan yang melaporkan sisi sosialnya mendapat apresiasi yang lebih bagus dari partisipan pasar modal.

E. Tujuan Akuntansi Sosial

Tujuan akuntansi sosial yang diajukan oleh Ramanathan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih secara periodik dari perusahaan. Kontribusi tersebut berupa biaya dan manfaat internal dari perusahaan.
- Mengetahui dampak strategi dan praktek perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap sumber daya dan status kekuasaan dari individual, komunitas, segmen sosial dan generasi. Hal ini harus konsisten dengan banyaknya prioritas sosial yang terbagi disatu pihak dan legitimasi aspirasi individual.
- Optimalisasi dalam semua konstituen sosial. Hal ini terkait dengan informasi yang relevan mengenai tujuan perusahaan, kebijakan, program, kinerja dan kontribusi terhadap tujuan sosial. Informasi yang relevan ini disediakan untuk akuntabilitas publik guna memfasilitasi pembuatan keputusan publik berdasarkan pilihan sosial dan alokasi sumber daya sosial. Informasi ini mengimplikasikan sebuah strategi laporan biaya/manfaat yang efektif berupa informasi yang diharapkan berpotensi secara optimal mengantisipasi konflik antara berbagai konstituen sosial masyarakat dengan perusahaan.

Corporate Social Reporting

Pentingnya akuntansi sosial perusahaan ini akan tersampaikan kepada para *stakeholder* melalui pelaporan aktivitasnya. Pelaporan Akuntansi Sosial perusahaan (*CSR*) tak pelak lagi menjadi isu penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungsunan hidupnya di dunia bisnis. Sampai saat ini belum ada standar pelaporan akuntansi sosial perusahaan. Namun dengan adanya tekanan dari pihak luar mengenai pelaporan dampak sosial perusahaan, hal ini ditanggapi oleh perusahaan dengan pelaporan akuntansi sosial perusahaan.

Perusahaan yang mengedepankan aspek sosial akan memasukan aspek tersebut dalam strategi dan operasi perusahaan. Aspek sosial tersebut harus dilaporkan kepada para *stakeholders*-nya, khususnya kepada para investor dalam bentuk pelaporan yang

mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Bentuk pelaporan ini kemudian dikenal dengan istilah *triple bottom line reporting*. Informasi ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai kemampuan menghasilkan *value* perusahaan, yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi dalam rangka memaksimalkan kemakmurannya. Hasil akhirnya adalah meningkatkan kepercayaan investor bahwa ia telah menanamkan dana ke tempat yang tepat sehingga pasar modal menjadi tidak gampang bergejolak, *cost of capital* menurun, dan proses alokasi sumber dana dan ekonomik menjadi efisien dan efektif. Dimensi ekonomi dari pelaporan ini mencakup lebih dari sekadar laporan tetapi harus menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai dalam konteks yang lebih luas seperti pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan komunitas (Djohan Pinnarwan, 2000)

Karakter akuntansi sosial yang ada membuat perusahaan sulit untuk melakukan pengukuran maupun pelaporan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang telah dilakukan (*externalities*). Secara teori, akuntansi sosial mensyaratkan adanya suatu :

- pernyataan tujuan
- serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya
- struktur pelaporan
- komunikasi informasi kepada pihak yang berkepentingan

Dengan melihat definisi dan tujuannya, maka karakter akuntansi sosial meliputi (Sri Murni, 2001):

1. Identifikasi dan pengukuran dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.
2. Pelaporan atas tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada perusahaan.
3. Megevaluasi prestasi sosial perusahaan
4. Menyediakan informasi yang memungkinkan penilaian komprehensif atas seluruh sumber daya dan akibat-akibat sosial ekonomi.

Melihat karakterter akuntansi sosial tersebut tidaklah mudah bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran maupun pelaporan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang telah dilakukan (*externalities*). Akuntansi konvensional tidak mampu mendukung masalah *externalitas*, karena akuntansi konvensional mengukur segala

sesuatu dengan nilai ekonomi perusahaan dan bukan nilai ekonomi masyarakat. Mengatasi ketidakmampuan akuntansi konvensional tersebut maka diperlukan standar akuntansi yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan problem tersebut. Setidaknya harus ada tindakan untuk mengembangkan konsep dan standar oleh penyusun standar akuntansi dan para ahli akuntansi sehingga dapat menampung masalah akuntansi sosial. Dengan demikian pada gilirannya akuntansi dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang diemban oleh perusahaan.

Pentingnya akuntansi sosial seiring dengan kemajuan dunia bisnis tampaknya tidak didukung dengan sistem pelaporan akuntansi sosial yang komprehensif. Sampai saat ini tidak ada aturan baku dalam hal pelaporan akuntansi sosial tersebut. Preston's (1983) menunjukkan bahwa pelaporan sosial perusahaan tidak memiliki kesatuan paradigma sehingga persoalan pelaporan akuntansi sosial tersebut sulit untuk mencapai kesepakatan. Literatur yang mengkaji *CSR (Corporate Social Reporting)* walaupun dinilai merupakan usaha yang sangat bagus untuk membuat kemajuan dalam bidang ini namun juga dinilai tidak memberikan penekanan terhadap konflik yang melandasi permasalahan pelaporan tersebut.

Ketiadaan tema pelaporan sosial perusahaan pada kerangka konseptual (*conceptual framework*) pada akuntansi konvensional membuat definisi parameter akuntansi sosial menjadi permasalahan yang besar. Hal ini berdampak pada dasar penilaian, analisis dan pengembangan kebijakan yang dianjurkan tidak mencapai kesepakatan. Sehingga tidak mengherankan apabila CSR tidak mempunyai paradigma yang sama.

Externalities (dampak luar/sosial perusahaan)

Externalities merupakan dampak kegiatan perusahaan pada masyarakat atau dampak luar perusahaan (Harahap 1999). *Eksternalities* terdiri dari ***external economic*** dan ***external diseconomic***. *External economic* terjadi apabila aktivitas-aktivitas perusahaan menyebabkan kenaikan sumber daya sosial dan dianggap sebagai *external benefit* atau *social benefit* yang merupakan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. *External diseconomic* terjadi apabila aktivitas perusahaan menyebabkan penurunan

sumber daya sosial dan dianggap sebagai *external cost* atau *social cost* yang merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan.

Externalities inilah yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi sosial. Masalah *externalities* mempunyai sifat yang membuat akuntansi sosial kurang diperhatikan (Yudiani 1998), yaitu:

1. Biaya dan manfaat sosial sukar diperkirakan sebelumnya.
2. Identifikasi dampak *externalities* sulit dilakukan sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi.
3. *Externalitis* tidak mempunyai harga pasar

Permasalahan yang harus dihadapi dan membutuhkan solusi adalah bagaimana perusahaan mempertanggung jawabkan *social benefit* dan *social cost* dan bagaimana pengakuan, pengukuran dan pelaporannya. Perusahaan harus tetap mempertanggung jawabkannya dengan mengukur dan mengungkapkan *social cost* maupaun *social benefit* pada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial.

F. Pengukuran, Pengakuan dan Pelaporan *Externalities*

Pengukuran dan Pengakuan *Externalties*

Akuntansi sosial timbul sebagai respon terhadap harapan masyarakat yang melahirkan perjanjian sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Konsekuensi perjanjian tersebut adalah perusahaan berkewajiban menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Dengan kata lain antara masyarakat dengan perusahaan saling mengadakan transaksi. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengembangkan akuntansi sosial adalah pengukuran *social benefit* dan *social cost*. *Social benefit* dan *social cost* merupakan *externalities* perusahaan sebagaia akibat adanya transaksi sosial antara perusahaan dengan lingkungannya termasuk masyarakat.

Ramanathan mendefinisikan transaksi sosial sebagai pelaksanaan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi berbagai kelompok sosial dan tidak diproses melalui pasar. Proses transaksi sosial yang tidak melalui pasar, menyebabkan tidak ada harga yang pasti untuk menggambarkan nilai pertukaran tersebut. Pada gilirannya hal ini menyebabkan transaksi akuntansi sosial sulit untuk diidentifikasi dan diukur. Kesulitan

ini juga merupakan salah satu sebab mengapa perusahaan mengabaikan masalah akuntansi sosial.

American Accounting Association dalam laporan *committee on Social Cost* (Mathew dan Ferera, 1996) menyatakan ada tiga tingkatan pengukuran yang berkaitan dengan akuntansi sosial yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan aktivitas.
2. Pengukuran aktivitas dengan menggunakan unit non moneter.
3. Penilaian aktivitas dengan taksiran finansial

Sedangkan Fredman (1989) mengusulkan langkah-langkah untuk mengakui dan mengukur transaksi akuntansi sosial adalah dengan cara:

1. Menentukan *social benefit* dan *social cost*.
2. Mengukur item-item yang relevan
3. Mengukur dalam satuan uang (nilai moneter)

Langkah-langkah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi *social benefit* dan *social cost*

Proses pertama pengukuran transaksi sosial adalah menentukan *social benefit* dan *social cost*. Selama ini belum ada pembakuan mengenai apa saja yang diklasifikasikan sebagai *social benefit* dan *social cost*. Identifikasi mengenai *social benefit* dan *social cost* secara paraktek, sangat tergantung pada persepsi perusahaan dengan mengacu konsep-konsep yang diberikan oleh para ahli akuntansi.

Fredman memberikan cara untuk mengidentifikasi *social benefit* dan *social cost* yaitu dengan menggunakan proses produksi dan distribusi perusahaan sebagai dasar pengidentifikasian.. Linowes (Fredman 1989), menyebutkan kategori *social benefit* dan *social cost* sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan manusia, produk dan lingkungan.

2. Pengukuran item-item yang relevan.

Setelah *social benefit* dan *social cost* dapat diidentifikasi, selanjutnya adalah mengukur item-item yang relevan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan rugi laba yang menyakut dasar pengukuran tertentu. Kesulitan pengukuran *social benefit* dan *social cost* terjadi karena interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya tidan melalui pasar , sehingga penetapan jumlah uang sulit dilakukan. kesulitan mengenai pengukuran *social benefit* dan

social cost (externalities) dapat diantisipasi dengan beberapa pendekatan pengukuran berikut (Harahap, 1999):

1. Menggunakan nilai pengganti

Nilai pengganti digunakan karena *externalities* tidak bisa ditentukan secara langsung. Nilai pengganti adalah nilai yang diperkirakan mempunyai manfaat sama atau pengorbanan yang sama dengan sesuatu yang diukur, yaitu dengan cara menghitung perubahan yang terjadi dalam produktivitas karena adanya perubahan kualitas kehidupan. Misalnya: pencemaran air dapat menimbulkan penurunan produktivitas manusia karena terganggu kesehatannya. Penurunan produktivitas akan menurunkan tingkat produksi, maka akan terjadi *social cost*. Sedangkan apabila perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan pencemaran, maka akan terjadi *social benefit*.

2. Menggunakan teknik survey

Pendekatan ini dilakukan dilakukan dengan cara mencari informasi dari masyarakat yang menderita kerugian atau menerima manfaat karena aktivitas perusahaan. Karena menggunakan pendekatan survey, pengukuran harus *social cost* dan *social benefit* ini harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan tidak setiap individu dalam masyarakat tahu dengan jelas dampak aktivitas perusahaan atas dirinya dan tidak mampu mengukur dampak tersebut dalam unit moneter. Contoh pendekatan survai adalah mewawancarai penduduk yang terkena pencemaran perusahaan, yaitu dengan menanyakan berapa jumlah kerugian yang diderita dan jumlah kompensasi yang harus dibayar perusahaan atas kerugian tersebut.

3. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga.

Dengan menggunakan pendekatan ini pengukuran tidak dilakukan oleh perusahaan tetapi oleh pihak luar (pihak ketiga) yang independen. Misalnya putusan pengadilan berupa denda yang harus dibayar oleh perusahaan karena pengaduan masyarakat atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Pengukuran *externalities* dapat juga dilakukan dengan menggunakan akuntansi biaya penuh (*full cost accounting*). Akuntansi biaya penuh dapat digunakan untuk menentukan biaya internal dan eksternal yang terkait dengan dampak dan aspek lingkungan entitas bisnis, produk atau proses untuk mencapai tujuan dan kebijakan lingkungan (Willis, 1997). Akuntansi biaya penuh menghendaki indentifikasi dan pengukuran dampak dan pengaruh lingkungan yang terkait dengan ekosistem. Dampak

dan pengaruh lingkungan tersebut berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam, degradasi dan perbaikannya.

Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut merupakan usaha untuk mengatasi masalah pengukuran. Sampai sekarang belum ada kesepakatan bagaimana *externalities* yang meliputi *Social Cost* dan *Benefit cost* dapat diidentifikasi dan diukur dalam praktek akuntansi keuangan, sehingga perusahaan dapat memilih pendekatan tersebut sesuai dengan persepsi masing-masing. Walaupun masih ada masalah mengenai bentuk pelaporan aktivitas sosial perusahaan, dengan adanya berbagai pendekatan pengukuran *externalities* maka *Corporate Social Reporting* tetap dapat dilakukan.

3. Pengukuran dalam satuan unit moneter.

Pengukuran dalam satuan uang untuk *externalities* (*social benefit* dan *social cost*) biasanya menggunakan nilai moneter. Pengukuran dengan satuan uang ini penting untuk dapat memberikan persepsi yang sama pada tiap-tiap orang, karena nilai moneter adalah bahasa umum dalam akuntansi. Tetapi dalam akuntansi sosial pemberian nilai moneter sulit dilakukan sehingga hasilnya tidak terlalu memuaskan.

Sebagian besar input (*cost*) yang terjadi lebih mudah ditentukan dalam unit moneter, dimana jumlahnya sebesar biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. *Output* berupa *benefit* sulit ditentukan karena bersifat *intangible*. Misalnya dalam kasus pencemaran, *social cost* dapat ditentukan dari jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat. Sedangkan *social benefit* ditentukan dari meningkatnya produktifitas masyarakat apabila perusahaan mencegah pencemaran tersebut. Pengukuran produktivitas merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai hal terutama masyarakat itu sendiri dan lamanya waktu yang tidak dapat ditentukan.

Adanya kesulitan dalam pemberian nilai moneter seperti yang disebutkan diatas, tidak menutupi kemungkinan untuk tetap dilakukan kuantifikasi atau pengukuran dampak aktivitas perusahaan dengan menggunakan unit moneter. Menurut Edward dan Black (Yudiani,1998) umumnya ukuran input (*cost*) lebih bisa dipraktekkan dan lebih memuaskan daripada ukuran output (*benefit*). Di samping itu dalam mengkuantifikasi externalitas dapat juga digunakan ukuran moneter dan non moneter seperti yang disarankan oleh Fredman (1989)

G. Pelaporan *Externalities*

Selama ini belum ada bentuk baku untuk melaporkan aktivitas sosial perusahaan. Hal ini terjadi karena belum ada kesepakatan yang mengatur mengenai isi dan bentuknya. Pada dasarnya laporan tersebut bersifat sama, yaitu menyajikan informasi tentang data *social benefit* dan *social cost* perusahaan.

Sejumlah perusahaan di beberapa negara telah melaporkan prestasi sosialnya. Cakupan aspek sosial yang dilaporkan masih sangat bervariasi. Ada yang melaporkan pertanggungjawaban sosialnya dalam laporan tahunan dan ada yang mempublikasikan informasi tersebut dalam laporan terpisah dari laporan tahunan. Guthrie dan Parker (Yudiani, 1998) melakukan penelitian terhadap laporan tahunan perusahaan di Australia, Amerika Serikat dan Inggris antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1993 menunjukkan bahwa sebagian besar (diatas 50%) dari 50 laporan tersebut mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial. Di Australia sebesar 50%, Amerika Serikat 85% dan di Inggris sebesar 98%. Informasi yang diungkapkan yaitu sumber daya manusia, komunitas dan lingkungan.

Guthrie dan Parker juga mengungkap cara pelaporan dampak sosial yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Di Amerika Serikat, laporan atas dampak sosial cenderung mengambil bentuk deskripsi singkat pada lapran tahunan dengan mengkuantifikasi dalam bentuk unit moneter (untuk *social cost*) dan non moneter. Di Inggris cara pengungkapan dampak sosial sama dengan di Amerika Serikat. Sedangkan di Australia pengungkapannya cenderung bersifat non moneter.

Variasi-variasi tersebut merupakan bukti bahwa belum adanya pembakuan dalam pelaporan informasi dampak sosial perusahaan. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaporannya. Perbedaan materi yang diungkap antara negara satu dengan negara lainnya diduga karena ketentuan undang-undang yang berbeda sebagai pencerminan kehendak rakyat.

Model alternatif pelaporan keuangan sehubungan dengan dampak sosial yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan oleh Parker, Ferris dan Otley (Purwono, 2000) dibagi dalam beberapa kategori. Perusahaan dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan untuk mengadaptasi model tersebut.

1. *Inventory approach*

Dampak-dampak sosial, baik positif maupun negatif diungkap dalam bentuk deskripsi. Pengungkapan dalam satuan moneter dilakukan bila data tersedia. Problem utama dari pendekatan ini adalah kurangnya kuantifikasi terhadap dampak sosial.

2. *Outlay Cost Approach*

Pendekatan ini melihat dari sudut pandang perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan berapa *cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukannya dengan membagi ke dalam kategori tertentu. Pengguna laporan keuangan bias melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pendekatan ini tidak berorientasi pada konstituen perusahaan, sehingga tidak mengungkapkan berapa *social cost* dan *benefit cost* yang timbul.

3. *Cost Benefit Approach*

Unsur-unsur yang dilaporkan adalah *social cost* dan *social benefit*. Pendekatan ini dipandang lebih memadai dari dua pendekatan sebelumnya, karena mampu membandingkan antara *social cost* dan *social benefit*. Pendekatan ini mampu memperkirakan berapa *social cost* dan *social benefit* yang timbul.

4. *Programme Management Approach*

Pendekatan ini melaporkan upaya dan hasil yang dicapai dari program sosial perusahaan. Laporan menyajikan *outlay cost* dari kategori dampak sosial tertentu, sasaran program dan mengevaluasi apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hasil yang dicapai disajikan secara naratif dan kuantitatif.

5. *Goal Accounting Approach*

Model ini merupakan variasi model *programme management approach* yang mengasumsikan bahwa organisasi menyusun tujuan operasional, finansial dan tujuan sosial.

H. Masalah akuntansi Sosial di Indonesia

Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan dilegitimasi lewat produk perundangan pemerintah. Contohnya UU no.23 tahun 1997 tentang Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 18 UU tersebut menyatakan tiap rencana yang

mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap lingkungan harus disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hal ini merupakan sinyal bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Pelaporan aktivitas perusahaan dari sudut pandang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia belum berkembang jika dibandingkan di negara-negara maju. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran para pengusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya masih relatif rendah. Masih banyak perusahaan yang beroperasi untuk memaksimalkan laba tanpa menghiraukan dampak sosial dari operasional perusahaan. Banyaknya keluhan masyarakat seperti pencemaran laut, sungai, tanah, kebakaran hutan belum banyak mendapat perhatian. Belum lagi yang terkait dengan sumber daya manusia seperti PHK, kontraprestasi karyawan yang dibawah UMR, serta kesejahteraan pegawai, biasanya hanya berkembang menjadi isu politik, tanpa solusi yang optimal. Hal ini didukung pula oleh para investor di pasar modal yang kurang memperhatikan isu lingkungan dalam mempertimbangkan investasi. Kurangnya respon dari para pelaku bisnis mengenai tanggung jawab sosialnya sedikit banyak juga dipengaruhi oleh otoritas hukum yang kurang optimal dalam menjalankan wewenangnya untuk membuat solusi serta penanganan yang memadai.

Prospek penerapan akuntansi sosial di Indonesia, walaupun mulai diperhatikan namun perkembangannya sangat lamban.. Dukungan terhadap akuntansi sosial ditandai dengan munculnya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Reaksi masyarakat juga makin meningkat berkaitan dengan isu lingkungan ini. Kondisi ini diharapkan membuat perusahaan makin termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Standar akuntansi keuangan yang selama ini berlaku di Indonesia belum mencakup kepentingan masyarakat dan lingkungan (Yuniarti, 1989). Hal ini merupakan tantangan pada para praktisi dan akademisi seperti penyusun standar (IAI), para akuntan, otoritas pasar modal, peneliti untuk melakukan telaah terhadap pengembangan bidang ilmu akuntansi sosial. Sehingga hasil dari kerja mereka akan terbentuk laporan kerja teoritis yang dapat dijadikan sebagai standar untuk pembuatan laporan yang berorientasi sosial. Dari tinjauan perspektif akuntansi seharusnya penelitian tentang hal ini dapat

dilakukan baik dari sisi *decision usefulness* dan *economic consequences* (Abdul Halim, 1999). Hingga saat ini standar akuntansi sosial di Indonesia masih belum ada. Sudah saatnya para pemerhati masalah lingkungan dari dunia akademisi akuntansi untuk mencoba memperhatikan dan membantu lewat penelitian.

I. Kesimpulan dan Saran

Harapan masyarakat mengenai pergeseran tujuan perusahaan dari aspek sosial membuat akuntansi sosial mempunyai peran yang sangat penting, mengingat masyarakat adalah *stakeholder* institusi bisnis yang keberadaannya tidak bisa diabaikan. Akuntansi sosial dengan perkembangannya yang lamban, sporadis, serta aplikasinya yang tidak beragam menimbulkan masalah yang rumit untuk kemajuan bidang ini. Masalah tersebut menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan tentang konsep atau metode pengukurannya.

Penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi sosial perusahaan masih sangat terbuka lebar. Banyak penelitian dibidang ini diluar negeri yang masih belum diadaptasi di Indonesia. Contohnya adalah apresiasi pasar modal terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, korelasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerjanya, dan lain-lain. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan akan mampu memberikan argumen mengenai pentingnya pelaporan aktivitas sosial perusahaan dan pada gilirannya akan menjadi peletak dasar standar akuntansi untuk akuntansi sosial.

Sampai saat ini belum ada standar yang dapat diterima berbagai kalangan mengenai akuntansi sosial. Problem utama yang timbul terutama dalam melakukan pengakuan, pengukuran dan pelaporan *eksternalities* dalam laporan keuangan perusahaan. Meskipun demikian perusahaan diharapkan dapat mulai menerapkannya sebagai bukti kepedulian akan lingkungan sosial dan sebagai kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. Keseriusan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosialnya bisa dilakukan dengan menyajikan *voluntary disclosure* tentang aktivitas sosialnya. Hal ini juga bisa dioptimalkan dengan aturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kita yakin bahwa dengan masyarakat yang semakin kritis dengan isu sosial maka perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi tentu akan mendapat apresiasi yang lebih baik di mata *stakeholder*. Pada gilirannya diharapkan keberadaan akuntansi sosial akan

meningkatkan kinerja perusahaan baik secara institusi bisnis maupun sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat luas.

J. Daftar Pustaka

Abdul Halim, **Perspektif Teori Akuntansi Keuangan Terhadap Masalah Lingkungan.**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 1999, Vol. 4, 101-112.

Belkoui Ahmed, *Accounting Theory*, Harcourt Brace Javanovich, Inc, 1981.

Belkoui Ahmed dan Philip G. Karpik, **Determinant of the Corporate Decision to Disclose Social Information**, Accounting, Auditing and Accountability Journal 1989 Volume 2.

Djohan Pinnarwan, *Sustainability dan Triple Bottom Line Reporting.*, Media Akuntansi Vol 10, Juni, 2000.

Glen Lehman, **Disclosing New Worlds: A Role for Social and Enviromental Accounting and Auditing.** Accounting Organizations and Society 24 (1999) pp 217-241.

Hendriksen, Eldon, and Michael Van Breda. 1992. *Accounting Theory*. Fifth Edition. Irwin Homewood, Illinois.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), **Standar Akuntansi Keuangan**, Jakarta : Penerbit Salemba Empat 1998.

Kavasseri V. Ramanathan. *Toward A Theory of Corporate Social Accounting*, The Accountng Review, July 1976, pp.516-528.

Martin Freedman, **An Anlaysisi of The Asociation Between Pollution Disclosure and Economic Performance.** Accounting, Auditing and Accountability Journal 1989 Volume 2.

Sri Murni, **Akuntansi Sosial: Suatu Tinjauan Mengenai Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan Eksternalities Dalam Laporan Keuangan**, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Januari 2001.

Scotts, W. 1997. *Financial Accounting Theory*. Int. Ed. Prentice Hall, Inc. London.

Watts.,Ross., and J. Zimmerman. 1996. *Postiive Accounting Theory*. Prentice Hall. International, Inc. London.